

Pentagonal Resistensi: Faktor Penyebab Rendahnya Implementasi Akuntansi Pada UMKM

Adhitya Bayu Suryantara* , Rini Ridhawati

Jurusan Akuntansi, Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Correspondence: adhityabayus@unram.ac.id

Received: 7 Juli, 2023 | Accepted: 3 Desember 2023 | Published: 16 Desember, 2023

Keywords:

Accounting
Complexity; Business
Relationship;
Educational
Background; Firm
Size; MSME's
Training

Abstract

MSMEs face obstacles that usually occur in business, the limitations of making financial reports. Limited accounting knowledge makes it difficult for MSMEs to determine the policies to be taken. This research uses an exploratory method to explore the causes of the low implementation of accounting by MSME actors. The informants in this study were owners or financial controllers of 10 MSMEs in the East Lombok Regency. Data collection techniques using interviews and observation are analyzed using transcribing, information reduction, codification, data visualization, and results analysis. The results of the study show that MSMEs think the preparation of accounting reports according to standards has not provided benefits for them. The compilation of reports according to standards is only carried out if there are demands related to capital assistance. MSMEs agree that records are important, and they make records based on a format adapted to the information they need. The five factors, namely educational background, accounting complexity, business size, relations with outsiders, and training received, contributed to building the perceptions of MSME actors in interpreting, compiling, and utilizing their company's accounting information.

Kata Kunci:

Hubungan Bisnis;
Kompleksitas
Akuntansi; Latar
Pendidikan; Pelatihan;
Ukuran Usaha;
UMKM

Abstrak

UMKM dihadapkan pada kendala yang biasanya terjadi dalam usaha yaitu keterbatasan pembuatan laporan keuangan. Pengetahuan akuntansi yang rendah menyebabkan sulit bagi pelaku usaha dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali penyebab rendahnya pengimplementasian akuntansi oleh UMKM. Informan dalam penelitian adalah pemilik/pengendali keuangan dari UMKM berjumlah 10 usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan transcribing, reduksi informasi, kodifikasi, visualisasi data, dan analisis hasil. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UMKM melihat sejauh ini penyusunan laporan akuntansi sesuai standar belum memberikan benefit bagi mereka. Penyusunan laporan sesuai standar hanya dilakukan jika ada tuntutan yang berkaitan dengan bantuan permodalan. Akan tetapi, UMKM sepakat bahwa pencatatan itu penting, dan mereka membuat pencatatan berdasarkan format yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Kelima faktor yaitu latar pendidikan, kompleksitas akuntansi, ukuran usaha, hubungan dengan pihak luar, dan pelatihan yang diterima memberikan kontribusi dalam membangun persepsi pelaku UMKM dalam memaknai, menyusun, dan memanfaatkan informasi akuntansi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara konsisten terus membuktikan eksistensinya sebagai penggerak ekonomi mikro di Indonesia. Pada tahun 2021, total PDB (Produk Domestik Bruto) yang mampu di sumbang oleh UMKM kurang lebih sekitar 61,07% atau senilai dengan Rp 8.573,89 triliun. Sisi lainnya, UMKM memiliki kemampuan menyerap 97% dari total Angkatan tenaga kerja yang ada, serta menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Lestari et al., 2022). Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM memiliki peran yang vital dalam mendistribusikan hasil pembangunan yang sekaligus juga merupakan dinamo yang menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. Pengembangan pada sektor UMKM memberikan dampak bagi masyarakat untuk menekan angka kemiskinan suatu negara (Susiani et al., 2021). Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM kerap menjadi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sehingga pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu di lakukan untuk menjadikan UMKM dapat berkembang dalam kualitas, daya saing produk, dan pengelolaan usaha, tidak hanya tumbuh dalam jumlah, agar keberlangsungan usahanya di masa depan berjalan dengan baik (Anggraini et al., 2021) (Wulandari et al., 2020).

Salah satu masalah yang umumnya dihadapi oleh UMKM ialah keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan (Sulisti, 2019). Pelaku UMKM umumnya belum sadar akan pentingnya laporan keuangan bagi usahanya karena keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan akuntansi (Damak-Ayadi et al., 2020). Padahal, pengetahuan akuntansi memiliki andil besar dalam kemajuan usaha yang dikelola (Biduri et al., 2021). Pengetahuan akuntansi yang kurang memadai dapat menyebabkan kegagalan manajemen dikarenakan pelaku usaha sulit menentukan kebijakan apa yang akan diambil, (Hudha, 2017). Tanpa adanya pengetahuan akuntansi yang memadai, usaha seakan tidak memiliki haluan yang jelas. Hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak mengetahui apakah usaha mengalami keuntungan atau malah justru sebaliknya dengan mengalami kerugian atau bahkan tidak ada perkembangan yang signifikan dalam usahanya (Perera et al., 2019). Selain keuntungan dan kerugian, masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha juga berkaitan dengan penentuan harga jual. Pelaku usaha seringkali menentukan harga bukan mengacu pada informasi akuntansi. Pelaku usaha menentukan harga berdasarkan insting, atau masih mengikuti harga standar di pasaran. Tanpa mempertimbangkan apakah harga tersebut *overpricing* maupun *underpricing*. Hal ini memperbesar kemungkinan menurunnya keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh UMKM (Suryantara & Animah, 2021).

Akuntansi merupakan kunci untuk melihat posisi keuangan dan pengukuran kinerja usaha yang dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan Ekonomi, sehingga dapat menentukan keputusan Ekonomi menjadi lebih baik (Anggraini et al., 2021). Adapun manfaat akuntansi bagi pelaku UMKM tentu memiliki nilai yang positif terhadap pengaturan keuangan pelakunya. Tetapi ternyata masih banyak pelaku UMKM menganggap bahwa akuntansi tidak begitu penting bagi usaha mereka (Biduri et al., 2021). Umumnya, pemilik UMKM berfokus pada pengembangan usahanya melalui pemasaran, mencari supplier yang sesuai, memberikan pelayanan yang baik semata, namun tidak pernah mengetahui secara rinci alur biaya yang keluar dan masuk (Mulyani, 2018).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sendiri telah berusaha untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Salah satunya ialah dengan meresmikan standar akuntansi

husus bagi UMKM yaitu SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) yang berlaku secara efektif 1 Januari 2018. Terbitnya SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sederhana dan praktis yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Namun setelah lima tahun berjalan, tampaknya harapan tersebut masih jauh panggang dari api. Meskipun standar ini menyediakan fasilitas berupa metode dan laporan yang jauh lebih mudah, akan tetapi motivasi untuk mengimplementasikan SAK EMKM oleh pelaku UMKM masih sangat rendah (Lestari et al., 2022); (Anggraini et al., 2021); (Susiani et al., 2021); (Biduri et al., 2021); (Rawun dan Tumilar, 2019); (Askandar dan Junaidi, 2019).

Berbicara tentang motivasi, berdasarkan pandangan dari kacamata *Theory of Planned Behavior* (TPB), motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu hal dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap seseorang terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behaviour*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi terhadap sesuatu (*perceived behaviour control*) (Ajzen & Fishbein, 2005). TPB berasumsi bahwa manusia pada umumnya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*) karena merupakan makhluk rasional yang mampu menggunakan informasi-informasi secara sistematis untuk memikirkan implikasi dari sebuah tindakan jika berperilaku tertentu (Anggraini et al., 2021).

Jika asumsi TPB dikembalikan ke konteks motivasi UMKM dalam mengimplementasikan akuntansi, maka apabila pelaku usaha memiliki persepsi bahwa akuntansi dapat memberikan manfaat kepada UMKM dalam mengembangkan usahanya, maka *believe power* dan *perceived power* akan memberi dorongan bagi pelaku usaha untuk mengimplementasikan akuntansi. Begitu juga jika pelaku UMKM meyakini akuntansi dapat diimplementasikan dengan mudah dan sederhana, maka hal tersebut dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengimplementasikan akuntansi. Tentunya untuk mewujudkan dua proposisi tersebut butuh jalan yang cukup panjang dan menantang serta tentunya dukungan dari semua *stakeholders* yang berhubungan erat dengan UMKM.

Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM dalam penerapan SAK EMKM. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengungkap lebih jauh mengapa fenomena rendahnya penerapan akuntansi oleh para pelaku UMKM dapat terjadi. Penelitian dilakukan di Lombok Timur dikarenakan terdapat 21.030 pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 (<https://data.ntbprov.go.id/>) dan mayoritas merupakan usaha mikro yang sangat memerlukan sentuhan manajemen profesional, termasuk laporan keuangan. Sementara riset yang menggali penyebab rendahnya penerapan akuntansi belum banyak dilakukan di Lombok Timur, sehingga penulis berharap dapat menutup kesenjangan hasil penelitian tersebut. Penelitian didesain untuk berfokus mendalami motif, alasan, serta kondisi internal para pelaku UMKM agar dapat ditelusuri posisi pengimplementasian akuntansi bagi para pelaku UMKM. Dengan diketahuinya alasan-alasan tersebut, dapat dipetakan faktor-faktor penghambat pengimplementasian akuntansi. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi informasi untuk menyusun strategi dalam rangka inklusivitas akuntansi pada UMKM kedepannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali lebih dalam suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.

Fenomena yang akan dialami adalah rendahnya pengimplementasian akuntansi oleh pelaku UMKM selama ini. Objek dari penelitian ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan logika berpikir para pelaku UMKM terhadap kebermanfaatan dan relevansi Akuntansi pada bisnis yang mereka jalani. Penelitian ini mengambil setting penelitian di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Informan dalam penelitian adalah pemilik/pengendali keuangan/pegawai keuangan dari UMKM. Kriteria pemilihan UMKM didasarkan pada bisnis yang dijalankan sudah berumur lebih dari tiga tahun serta memiliki tempat yang permanen (bukan bangunan semi permanen). Selanjutnya, UMKM yang dijadikan informan juga minimal sudah melakukan pencatatan dan memanfaatkan informasi keuangan dalam mengelola bisnisnya. Jenis UMKM mewakili dari setiap sektor yaitu dari sektor jasa, dagang, dan manufaktur. Sementara sasaran penelitian ini berjumlah 10 UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur, yaitu Toko Emas Rahmat (TER), UD. Dende Putri (DP), Antara Adventure (AA), Apotek Neva (AN), UD. Rahmat (UR), Rumah Kreatif Linsi (RKL), Perusahaan Krupuk Kulit Luluk (KKL), UD. Putra Jaya (PJ), Cangos Motor (CM), dan Deny.net (DN). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data mengikuti kaidah analisis data kualitatif yaitu *transcribing*, reduksi informasi, kodifikasi informasi, visualisasi data, dan analisis hasil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Persepsional Pelaku UMKM Terhadap Relevansi Pengimplementasian Akuntansi

UMKM merupakan salah satu kegiatan usaha yang berperan dalam memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengimbangi pertumbuhan pendapatan daerah secara keseluruhan, dan mencapai stabilitas perekonomian nasional. UMKM memiliki posisi strategis karena mempunyai potensi besar dalam mengembangkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, UMKM memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang dirancang untuk membantu UMKM berfungsi dengan baik dan meningkatkan produktivitas usaha. Salah satu upaya pengelolaan keuangan adalah dengan menyusun laporan keuangan setiap periode untuk memantau kinerja bisnis.

Para pelaku UMKM pada dasarnya sangat menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, dan secara khusus memahami pentingnya akuntansi sebagai bagian yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik KKL yang mengungkapkan:

“... kalau nyatat itu pasti, semua kita catat rinciannya (sembari memperlihatkan buku double folio yang digunakan untuk mencatat). Berapa jumlah barang datang, berapa yang (kulit) kering dan basah, berapa minyak, gas, bumbu, upah anak buah, ngopinya, rokok, makan. Apalagi utang-utang pelanggan sama teman-teman ini pasti kita catat juga. Jadinya kita tau berapa jumlah uang (kas) yang habis sama berapa yang masuk... Apalagi sekarang alhamdulillah bisnis udah semakin besar, satu buku ini (double folio) habis setahun aja. Nggak bisa cuma ngandelin ingatan lagi kalau sekarang”

Pernyataan dari pemilik KKL juga diamini oleh hampir seluruh pemilik UMKM yang menjadi objek penelitian ini. Mayoritas UMKM menyatakan sangat membutuhkan pencatatan dalam menjalankan bisnisnya, mengingat tuntutan yang dihadapi saat ini oleh pelaku UMKM baik internal maupun eksternal. Tuntutan internal yang dihadapi adalah karena sudah semakin kompleksnya transaksi yang dihadapi sehingga mengharuskan pelaku UMKM untuk mencatat

secara rinci transaksi yang terjadi di usahanya. Tuntutan kedua adalah karena pelaku UMKM tidak lagi menjalankan sendiri bisnisnya, namun juga sudah mulai merekrut karyawan sehingga dibutuhkan mekanisme pengendalian. Sementara Tuntutan eksternal muncul ketika pelaku UMKM berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan informasi keuangan dari pelaku UMKM.

Seperti misalnya yang dialami oleh pemilik dari DP yang mana pada tahun 2020 lalu mendaftarkan usahanya pada Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan modal dan bantuan berupa pelatihan dan binaan untuk meningkatkan usahanya. Dengan menjadi anggota Dinas Koperasi, pemilik usaha mendapatkan bantuan modal usaha yang berupa pinjaman dengan akad bagi hasil. Modal tersebut disalurkan Dinas Koperasi dengan membuat BUMMAS (Badan Usaha Milik Masyarakat), bantuan inilah yang mengharuskan pemilik usaha sebagai penerima bantuan untuk membuat laporan laba rugi. Bantuan dengan akad bagi hasil ini, mengharuskan penerima bantuan membagi 30% dari hasil usaha diserahkan kepada BUMMAS, sedangkan 70% hasil usahanya menjadi keuntungan penerima bantuan. Sejak saat itu pemilik usaha merasakan manfaat dari pencatatan, karena dengan adanya pencatatan dia bisa mengetahui keuntungan yang didapatkan dari usahanya secara berkala, baik perhari, perminggu ataupun perbulannya.

Namun apakah praktik akuntansi dalam hal pencatatan yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM sudah dapat dikatakan sesuai dengan standar akuntansi? Tentu saja perlu pendalaman lebih lanjut untuk dapat menarik pernyataan tersebut. Sebagaimana yang diketahui, akuntansi sendiri merupakan sebuah sistem penyusunan informasi. Selayaknya sebuah sistem, maka akuntansi dapat dibagi menjadi kegiatan input, proses, dan output (Martani et al., 2012). *Input* dalam akuntansi sendiri adalah adanya kejadian transaksi, prosesnya adalah identifikasi transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan ringkasan transaksi yang menjadi laporan keuangan. Terakhir *output* utama dari akuntansi adalah laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan. Mengacu pada hal tersebut, maka pencatatan yang telah dilakukan oleh sebagian besar pelaku UMKM berdasarkan temuan dilapangan masih berada di tahap awal dari siklus akuntansi. Untuk dapat dikatakan telah mengimplementasikan akuntansi secara menyeluruh, tentunya dibutuhkan beberapa proses lanjutan sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Hal ini yang masih menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku UMKM karena terdapatnya *gap* antara praktik yang terjadi dilapangan dengan standar yang berlaku (Damak-Ayadi et al., 2020) (Wulandari et al., 2020) (Anggraini et al., 2021) (Lestari et al., 2022) (Biduri et al., 2021) (Savitri & Saifudin, 2018) (Sularsih & Sobir, 2019).

Kesenjangan (*gap*) yang terjadi disebabkan utamanya oleh resistensi yang dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri. Pelaku UMKM menganggap bahwa informasi yang mereka peroleh saat ini sudah dapat mencukupi untuk membantu mereka menjalankan bisnisnya. *“...Tidak ada neraca keuangan, aspek keuangan yang saya perhatikan yang cuma uang masuk dan keluar saja atau biasanya hanya total kas yang saya miliki berapa gitu saja. Jadi tidak saya rinci keuangan saya secara keseluruhan, nilai dari peralatan dan perlengkapan lainnya pun juga tidak saya perjelas dengan nominal”* ungkap pemilik DN menanggapi pertanyaan peneliti. Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik RKL yang menyatakan bahwa *“...pembukuan ya hanya sebatas catatan-catatan keuangan tadi, berupa catatan-catatan*

penerimaan dan pengeluaran uang saja. Jadi tidak ada laporan khusus dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap dan rapi”.

Pemilik AA selangkah lebih maju dalam pencatatan transaksinya, dimana transaksi yang terjadi direkapitulasi menggunakan aplikasi Buku Kas. Meskipun begitu, aplikasi ini hanya memberikan informasi berupa laporan arus kas dan laba rugi:

“...untuk proses penyusunan bisa dibilang sangat simple ya dikarenakan untuk membuat laporan ini saya menggunakan aplikasi buku kas. Di aplikasi tersebut kita hanya perlu mencantumkan harga jual dan harga pokok barang yang terjual serta pengeluaran-pengeluaran yang saya lakukan. Nantinya aplikasi akan langsung membuat laporannya”.

Pemilik dari DN bahkan menambahkan dengan sistem bisnis yang dijalaninya saat ini, pencatatan secara rinci tidak diperlukan karena transaksi yang terjadi sangat homogen sehingga kebutuhan atas informasi akuntansi juga sangat minim *“... saya malas, ribet, nggak ada ruginya juga kita usaha wifi ini, tinggal tidur-tidur laporan hasil penjualan voucher tetap masuk, Kalau ada panggilan pelanggan untuk memperbaiki jaringan wifi di rumah mereka tinggal saya suruh karyawan langsung kesana perbaiki”.*

Fenomena yang terjadi pada pelaku UMKM yang menganggap bahwa informasi yang mereka butuhkan saat ini sudah terpenuhi pada dasarnya tidak datang secara serta merta. Mengacu pada *Theory of planned behaviour* (TPB), makna kebutuhan dibentuk oleh persepsi setiap pelaku, dan persepsi atas pemenuhan informasi dan kebermanfaatan informasi dibentuk oleh latar belakang setiap *perceiver* yang memberikan dampak kuat atas tindakan yang pada akhirnya harus dilakukan (*role perception*). Berdasarkan hasil analisis kontekstual yang peneliti lakukan atas informasi di lapangan, maka setidaknya beberapa faktor kuat teridentifikasi sebagai pembentuk persepsional yang menyebabkan rendahnya implementasi akuntansi pada pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian. Faktor-faktor tersebut adalah Tingkat Pendidikan, Skala Usaha, Kompleksitas Akuntansi, Hubungan Dengan Pihak Luar, dan Sosialisasi dan Pelatihan. Kelima faktor yang teridentifikasi tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.

Peran Latar Pendidikan, Kompleksitas Akuntansi, dan Kualitas Pelatihan/Sosialisasi dalam Rendahnya Pengimplementasian Akuntansi.

Tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan akuntansi menjadi salah satu penyebab rendahnya penerapan SAK EMKM pada UMKM yang diteliti. Pelaku usaha yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi diyakini dapat memiliki persepsi yang lebih baik tentang SAK EMKM. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah di dapatkan dari informan, mayoritas UMKM yang telah diteliti memiliki pengetahuan mengenai pencatatan keuangan akuntansi yang sangat rendah. Hanya bendahara dari UDR yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, itupun terakhir kali dipelajarinya saat masih mengenyam bangku kuliah sehingga tidak pernah memperbarui pengetahuan tentang standar akuntansi yang terbaru:

“...tidak tau ya, hanya tau pelaporan keuangan yang saya pelajari pada saat kuliah saja. Untuk SAK EMKM saya tidak tau karena belum ada ya pelatihan pelatihan seperti itu dan baru dengar juga”

Sementara informan lainnya tidak melakukan prosedur akuntansi yang lengkap, dari keterangan informan mereka tidak melakukan pencatatan yang lengkap dikarenakan mereka tidak paham tentang ilmu akuntansi. Seperti yang dipaparkan oleh pemilik dari DP *“saya mau melakukan pencatatan yang lengkap karena saya ingin keuangan usaha saya bagus, tapi saya*

belum memahami sepenuhnya ini saja di ajarkan oleh saudara dan suami saya, soalnya saya juga tidak pernah mengikuti pelatihan. kalo kita bisa, kita pasti akan lebih semangat mencatat keuangan, tapi kalo gak bisa, jadi makin males”. Kondisi ini juga diperkuat oleh pemilik RKL yang menyatakan bahwa pengetahuannya tentang akuntansi sangat terbatas mengingat tingkat pendidikannya hanya sebatas SMA, *“menurut saya pencatatan akuntansi itu sulit jika memang bukan profesi, apalagi saya hanya tamatan SMA”*.

Kondisi ini secara tidak langsung membangun persepsi dikalangan pelaku UMKM bahwa akuntansi merupakan hal yang sulit dan rumit. Hal ini dikarenakan basis keilmuan yang mereka miliki jarang yang membahas akuntansi secara mendalam. Andaikanpun pernah menerima pendidikan tentang akuntansi, masih sangat teknis sehingga stigma yang terbentuk pada akhirnya adalah akuntansi adalah pencatatan yang kompleks. Ketika peneliti menanyakan kendala apa yang dialami sehingga tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yaitu SAK EMKM, alasan yang utama yang dialami para pelaku UMKM yaitu ketidakpahaman mereka akan akuntansi maupun SAK EMKM. Para pelaku UMKM menganggap bahwa akuntansi terlalu sulit dan ketidak mampuan sumber daya manusia yang dimiliki dalam penerapannya. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik TER *“karena kita merasa ribet aja ya, kita juga tidak ada yang menuntut, usaha-usaha sendiri dan itu yang membuat kita lalai, selain itu juga kita sibuk, dari pagi sampai sore kerja, malamnya istirahat”*.

Senada dengan pemilik TER, pemilik dari PJ juga berpendapat bahwa akuntansi merupakan suatu pekerjaan yang cukup menguras tenaga dan waktu, sehingga hanya akan disusun jika memang ada hal yang menguntungkan juga bagi UMKM, *“pernah sih dulu ada pelatihan tentang manajemen keuangan, tapi ribet sekali, mereka menjelaskan tentang pencatatan laba rugi seperti itu. Kecuali kalau ada bantuan baru kita melakukan pencatatan karena itu yang di minta dari sana, pencatatan rincian seperti pembelian bahan sekian, seperti itu...”*

Untuk menutupi kebutuhan dengan kesenjangan pengetahuan akuntansi yang dimiliki, mayoritas pemilik/pengelola UMKM pada akhirnya membuat pembukuan yang sederhana sesuai dengan pemahaman masing-masing dengan beragam media, baik secara manual menggunakan buku hingga digital seperti excel dengan format yang beragam. Hal ini karena mereka tidak paham bagaimana seharusnya menyusun laporan keuangan dari pencatatan, pengakuan dan pengukuran hingga penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Fenomena yang terjadi pada pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian ini pada dasarnya dialami juga oleh pelaku UMKM di tempat lainnya. Penelitian Savitri (2018) pada UMKM misalnya, menyimpulkan bahwa UMKM tersebut sama sekali tidak menerapkan pencatatan akuntansi pada usahanya. Hal ini tersebut dikarenakan persepsi pengusaha UMKM yang memiliki persepsi bahwa pencatatan akuntansi harus dilakukan dengan seorang yang ahli dibidangnya atau seorang akuntan.

Senada dengan hasil penelitian dari Sularsih & Sobir (2019), yang menyimpulkan bahwa pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana dalam mencatat keuangan usaha. Alasannya pun sama. Pelaku UMKM tidak menyusun laporan keuangan karena akuntansi dianggap sulit untuk diterapkan dan rumit. Di sisi lain, Risal & Wulandary (2021) menyimpulkan bahwa pelaku UMKM belum begitu memahami proses akuntansi secara utuh. Begitu juga pencatatan transaksi yang belum dicatat secara konsisten. Beberapa pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan jika nilai transaksinya memiliki nominal yang relatif

besar. Motivasi penyusunan laporan keuangan timbul ketika pelaku UMKM membutuhkan laporan keuangan sebagai syarat dari pihak ketiga atas modal usaha. Jika butuh modal usaha, maka syarat penyusunan laporan keuangan akan dilakukan.

Peran Skala Usaha dan Hubungan dengan Pihak Luar dalam Rendahnya Pengujiimplementasian Akuntansi

Dimensi usaha sebagai indikator yang mengukur skala atau besarnya suatu usaha dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor seperti jumlah karyawan, aset perusahaan, dan volume penjualan. Faktor-faktor ini merupakan variabel kontekstual yang mencerminkan tuntutan, pelayanan, atau produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi (Haryani, 2018). Meningkatnya ukuran usaha, diharapkan pengusaha akan terdorong untuk mencari solusi dan pembelajaran terkait dengan tantangan yang dihadapi. Pertumbuhan usaha yang signifikan juga mendorong pemikiran mengenai pentingnya penerapan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan guna mendukung pengelolaan aset dan evaluasi kinerja keuangan (Pratiwi & Hanafi, 2016).

Dari hasil wawancara dengan informan juga menjelaskan bahwa skala usaha yang dijalankan membuat pelaku UMKM merasa berat jika harus melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM, karena usaha yang dijalankan masih sangat sederhana. Selain itu, jika mereka harus menggunakan jasa akuntan, maka memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan menurut pelaku UMKM pencatatan akuntansi yang seperti itu pun tidak mempengaruhi usaha mereka. Jika harus menggunakan tenaga sendiri, pencatatan akuntansi SAK EMKM dianggap akan sangat menyita waktu dan tenaga, sementara usaha yang mereka jalankanpun membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik dari CM pada saat wawancara *“tidak mas, soalnya ini usaha kecil, jadi menurut saya nggak perlu karna bisa makan biaya yang banyak, jadi cukup dengan pencatatan sendiri aja”*.

Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik PJ yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan yang dimiliki belum menuntutnya untuk melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar, *“kalau masalah laporan keuangan dikarenakan usaha saya masih sederhana dan pendapatan yang tidak terlalu besar jadi saya gak perlu membuat laporan keuangan untuk usaha saya, cukup dengan begini saya bisa memperkirakan pengeluaran saya dan bisa mengetahui kondisi usaha saya”*

Sementara pemilik KKL mengungkapkan catatan yang dibuat adalah catatan yang memang dimengerti makna informasinya, karena tujuan informasi tersebut memang diperuntukan bagi pengambilan keputusan pemilik, bukan ditujukan untuk pihak luar.

“...ini kalau orang luar baca buku ini bingung dia, soalnya memang kita aja yang ngerti apa isinya, mana sumber uang masuk, mana uang keluar, mana yang hutang. Yang penting kita catat semua kegiatan biar nggak lupa aja dan tau berapa habis uang untuk produksi. Tapi kalau mau harus pakai standar akuntansi kita bingung buatnya bingung bacanya juga nanti”

Pernyataan dari pemilik KKL juga diperkuat oleh pemilik TER yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan dengan pihak luar menyebabkan tidak dibutuhkannya pencatatan sesuai standar akuntansi.

“... kan kita-kita aja yang baca, nggak ada istilahnya apa itu, eee audit-audit gitu. Karena jual emas ini kan nggak kayak jual barang biasa, gramnya, karatnya kita catat semua. Kita yang punya ngerti ya udah, itu kita pakai format pencatatannya. Dulu juga pernah kita angkat utang

di bank, tapi nggak ditanya juga mana laporan keuangannya. Dilihat banyak yang bisa dijadikan jaminan, ya udah tembus pinjemannya”.

Realita yang muncul pada pelaku UMKM yang diteliti dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan realita yang muncul ditempat lainnya. Penelitian dari (Lestari et al., 2022) mengungkapkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh pemilik UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Hal ini mencakup kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bidang akuntansi, pembatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sosialisasi yang memperkenalkan SAK EMKM kepada para pelaku UMKM. Selain itu, persepsi yang dimiliki oleh UMKM terhadap akuntansi cenderung rendah sehingga sebagian besar dari mereka kurang memahami konsep akuntansi beserta manfaatnya bagi perkembangan usaha mereka. Adapun penelitian (Biduri et al., 2021) mengungkapkan pencatatan yang pelaku UMKM buat hanya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa mengklasifikasikannya ke bentuk laporan keuangan yang seharusnya, seperti yang memuat neraca, laba/rugi, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Mengacu pada pandangan-pandangan yang diberikan oleh pemilik UMKM tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kebermanfaatan akuntansi menjadi titik kunci dari disusunnya laporan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku. Pelaku UMKM melihat bahwa sejauh ini penyusunan laporan akuntansi sesuai standar belum memberikan benefit bagi usaha mereka. Sehingga penyusunan laporan sesuai standar hanya akan dilakukan jika memang ada tuntutan untuk itu, terutama sekali jika berkaitan dengan bantuan permodalan. Akan tetapi jika tidak terdapat benefit atas kerasnya upaya mereka dalam menyusun laporan keuangan, maka mereka tidak akan melakukannya.

Hanya saja, sisi lain yang perlu dipahami, para pelaku UMKM sepakat bahwa pencatatan itu penting, dan mereka membuat pencatatan berdasarkan format yang beragam menyesuaikan dengan informasi yang mereka butuhkan. Satu kata yang tepat untuk menggambarkan realita yang terjadi pada pelaku UMKM ini adalah, informasi yang bermanfaat dan dipahami oleh pemilik UMKM menjadi lebih penting dibandingkan informasi yang harus disesuaikan dengan standar. Kelima faktor yaitu latar pendidikan, kompleksitas akuntansi, ukuran usaha, hubungan dengan pihak luar, dan pelatihan yang diterima memberikan kontribusi dalam membangun persepsi pelaku UMKM dalam memaknai, menyusun, dan memanfaatkan informasi akuntansi perusahaan mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). *The influence of attitudes on behavior*. (D. Albarracín, B. Johnson, & M. Zanna (eds.)). The handbook of attitudes, Lawrence Erlbaum Associates.
- Anggraini, R., Sokarina, A., & Suryantara, A. B. (2021). Analisis Penyebab Rendahnya Implementasi SAK-EMKM: Studi Pada UMKM di Kabupaten Lombok Timur. *THE 1ST UKIP INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS, MANAGEMENT, AND ACCOUNTING: Digital Business in the Endemic Challenges and Strategic Ahead*. <https://ojsapaji.org/index.php/UKIPInternationalConference/article/view/75>
- Biduri, S., Wardani, D. P. K., Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2021). Skeptisme Pelaku Usaha

- Mikro Terhadap Standar Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 431–448. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.25>
- Damak-Ayadi, S., Sassi, N., & Bahri, M. (2020). Cross-Country Determinants of IFRS for SMEs Adoption. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(1), 147–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2018-0118>
- Haryani, D. (2018). *PENGARUH JENJANG PENDIDIKAN, UKURAN USAHA SERTA INFORMASI DAN SOSIALISASI TERHADAP PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)*.
- Hudha, C. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi Dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Dimoderasi Ketidakpastian Lingkungan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 5(1), 68. <https://doi.org/10.26740/jepk.v5n1.p68-90>
- Lestari, F. A., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). Implementasi Akuntansi Pada Unit Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Sak Emkm (Studi Pada Umkm Kota Mataram). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 155–165. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.192>
- Martani, D., Sylvia, V. N., Ratna, W., Aria, F., & Edward, T. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah PSAK*. Salemba Empat.
- Mulyani, A. S. (2018). Manfaat Informasi Akuntansi Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 102–108.
- Perera, D., Chand, P., & Mala, R. (2019). Confirmation Bias in Accounting Judgments: The Case for International Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Enterprises. *Accounting & Finance*, 60(4), 4093–4119. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/acfi.12523>
- Pratiwi, N. B., & Hanafi, R. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 79. <https://doi.org/10.30659/jai.5.1.79-98>
- Risal, & Wulandary, R. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Umkm Di Kota Pontianak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 14–26.
- Savitri, R. V., & Saifudin, . . (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(2), 117–125.
- Sularsih, H., & Sobir, A. (2019). Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *JAMSWAP Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 10–16.
- Suryantara, A. B., & Animah, A. (2021). Analisis Biaya Strategis Dengan Metode Activity Based Costing Pada UMKM Kerupuk Kulit Lombok. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 5(1), 195–208. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3436>
- Susiani, R., Yusuf, P. S., Ilyas, S., & Syafdinal, S. (2021). Implementation Of Financial Report Preparation For Small And Medium Micro Enterprises (Msmes) (Survey in Sukajadi Village, Soreang District, Bandung Regency). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1563–1566.
- Wulandari, R. E., Sutrisno, S. T., & Ghofar, A. (2020). Factors affecting the implementation of financial accounting standards for MSMEs with environmental uncertainty as moderating variables. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(7), 160–166. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.945>